Pemkab Pasuruan Dukung KPK Percepat Pelaporan e-LHKPN

Kamis, 8 Maret 2018

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mendukung program KPK dalam percepatan pelaporan e-LHKPN. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah, Agus Sutiaji, dalam pembukaan bimbingan teknis di Gedung Serbaguna Pemkab Pasuruan. Sosialisasi dan pendampingan e-LHKPN bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Agus Sutiaji berharap para pejabat negara patuh pada perundang-undangan dengan melaporkan harta kekayaannya secara benar sebagai bentuk pencegahan korupsi. KPK memberikan kemudahan dalam penyampaian LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN, dan pelaporan kini dilakukan satu tahun sekali.

Pelaporan e-LHKPN dimulai sejak 1 Januari hingga 31 Maret mendatang. Keterlambatan pelaporan akan mempengaruhi peringkat kinerja wajib lapor. Wajib lapor harus melaporkan harta yang 100% dalam penguasaan penyelenggara negara, pasangan, dan anak dalam tanggungan.

Bimbingan teknis ini dihadiri oleh perwakilan dari beberapa pemerintah daerah dan diikuti 132 wajib lapor. Klinik e-LHKPN diresmikan oleh KPK dan DPR-RI sekitar satu bulan yang lalu.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.